

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan proses yang kompleks dan multidimensional, yang bertujuan untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif menurut Todaro dalam (Pasoman et al., 2024). Salah satu tantangan yang dihadapi dalam proses pembangunan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia adalah ketimpangan pendapatan.

Ketimpangan pendapatan telah menjadi isu yang sangat menarik dan sering dibahas di kalangan ekonom dan pembuat kebijakan di tiap negara. Dikarenakan terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan, yang nantinya distribusi pendapatan di kalangan masyarakat menjadi semakin tidak merata. Kondisi tersebut dapat menciptakan jurang yang semakin lebar antara kelompok masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi relatif baik yaitu mereka yang tergolong kaya dengan kelompok yang berpendapatan rendah yang disebut kelompok miskin (Febriyani & Anis, 2022).

Oleh sebab itu, ketimpangan pendapatan menjadi suatu fenomena yang tidak dapat dihindari dan terjadi baik di negara maju dan negara berkembang. Perbedaannya terletak pada sejauh mana kesenjangan tersebut berkembang di setiap daerah, di mana beberapa wilayah dapat mengalami ketimpangan yang lebih tajam dibandingkan wilayah yang lain.

Menurut (Todaro & Smith, 2006) Ketimpangan distribusi pendapatan dapat diukur menggunakan gini rasio yang nilainya berkisar antara 0 hingga 1. Rasio tersebut berfungsi sebagai indikator untuk melihat serta menilai tingkat

ketimpangan di suatu wilayah. Kian tinggi gini rasio, maka kian besar tingkat ketimpangan dan juga sebaliknya, jika gini rasio yang lebih rendah maka tingkat ketimpangan yang lebih kecil.

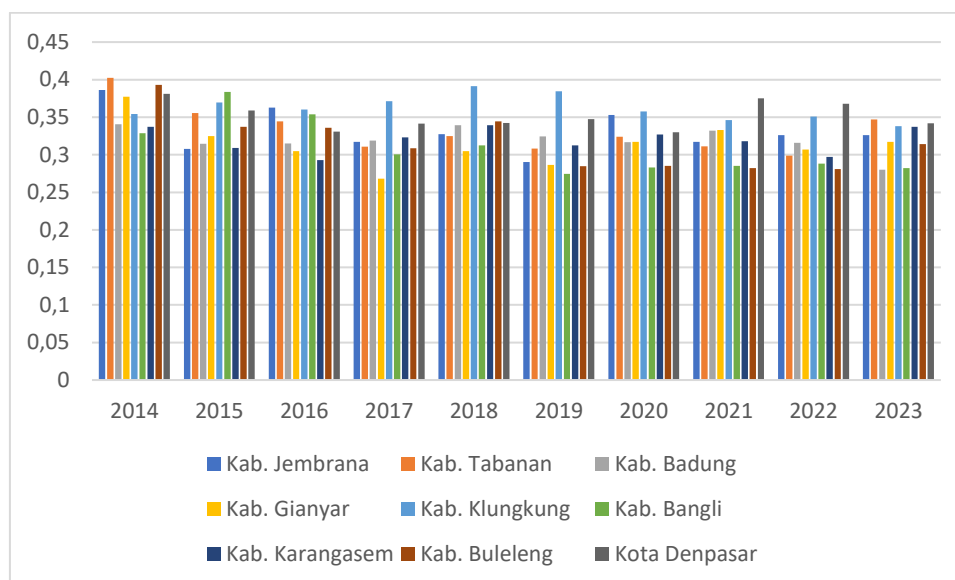
Di Indonesia salah satunya yaitu Provinsi Bali, telah dikenal luas hingga ke berbagai belahan dunia sebagai destinasi wisata internasional, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2024b). Dengan adanya reputasi tersebut, diharapkan distribusi pendapatan di wilayah ini dapat dilakukan secara adil.

Namun, pada kenyataannya Provinsi Bali yang terdiri dari satu kota, delapan kabupaten menghadapi masalah ketidakmerataan pendapatan yang disebabkan adanya perbedaan potensi dan karakteristik yang ada di setiap wilayah (Triarsa & Purbadharmaja, 2021). Ketimpangan ini dapat memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga penting untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap fenomena ini.

Teori Kuznets menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan akan meningkat pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, lalu menurun seiring tercapainya pembangunan yang lebih merata (Todaro & Smith, 2006). Dalam konteks Provinsi Bali, teori ini digunakan untuk melihat kesenjangan antar wilayah karena adanya pola pembangunan ekonomi yang bervariasi dan kemampuan pertumbuhan yang berbeda di setiap daerah.

Proses percepatan pembangunan antar wilayah sering kali tidak merata yang dipengaruhi karena perbedaan karakteristik baik dari segi geografis maupun potensi sumber daya yang tersedia. Dengan perbedaan ini dapat tercipta pola pembangunan ekonomi yang tidak konsisten, yang pada gilirannya mengakibatkan perbedaan

kemampuan pertumbuhan masing-masing wilayah (Arafah & Khoirudin, 2022). Hal tersebut menjadi penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan di Provinsi Bali yang dapat dilihat dari Gini Ratio kabupaten/kota di Provinsi Bali.



Gambar 1.1. Gini Rasio Provinsi Bali Menurut Kabupaten dan Kota
(Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah))

Berdasarkan data gini rasio kabupaten dan kota di Provinsi Bali tahun 2014-2023, bahwa kondisi ketimpangan pendapatan termasuk pada kategori sedang karena berada pada rentang 0,3 sampai dengan 0,5. Pada tahun 2023 menunjukkan adanya ketimpangan, namun perbedaan gini rasio antar kabupaten/kota tidak terlalu besar dilihat dari Kabupaten Badung dengan nilai gini rasio 0,280 yang merupakan nilai terendah diantara kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Bali karena di dominasi oleh objek wisata seperti pantai kuta dan pantai pandawa. Namun, Kabupaten Tabanan memiliki gini rasio tertinggi sebesar 0,347 dikarenakan lebih di dominasi oleh sektor pertanian. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan di daerah tersebut masih menjadi masalah yang perlu diatasi.

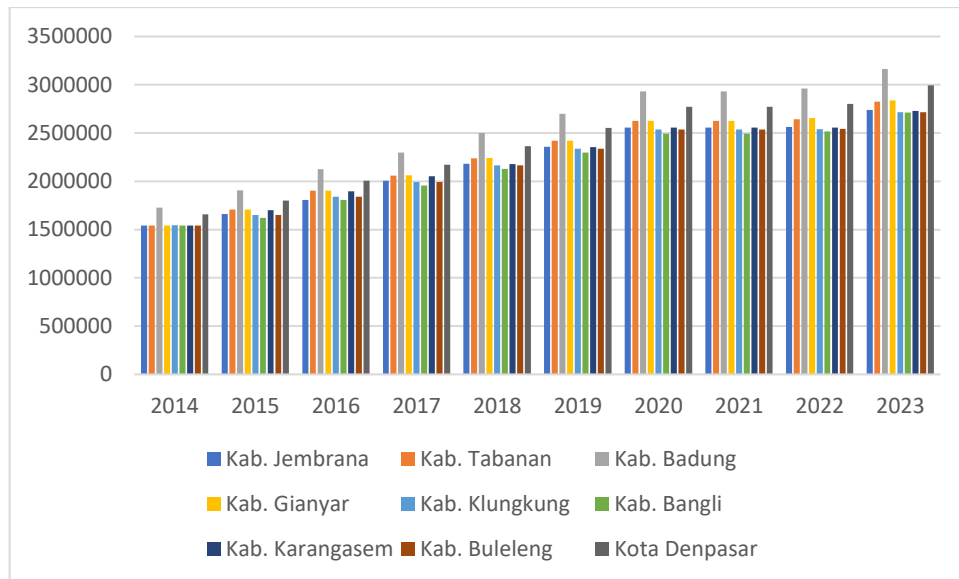
Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi ketimpangan pendapatan di suatu wilayah menurut Adelman & Morris (1973), yang pertama

yakni pertumbuhan penduduk tinggi yang dapat menurunkan pendapatan per kapita, inflasi tanpa peningkatan produksi barang, ketidakmerataan pembangunan antarwilayah, dominasi investasi pada proyek padat modal yang meningkatkan pengangguran, kurangnya mobilitas sosial, kebijakan substitusi impor yang meningkatkan harga barang domestik, penurunan nilai tukar dalam perdagangan internasional bagi negara berkembang, dan terakhir penurunan produktivitas industri kreatif (Caesarisma & Hamrullah, 2023).

Untuk mendalami faktor tertentu terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Bali, penelitian ini menganalisis pengaruh dari upah minimum, tingkat partisipasi angkatan kerja, penanaman modal asing, dan jumlah penduduk miskin. Salah satu faktor yang menjadi fokus adalah upah minimum, ditetapkan oleh Pemerintah untuk dapat memastikan pekerja agar memperoleh gaji yang sesuai dengan standar hidup layak. Dengan adanya peningkatan upah minimum dapat berkontribusi pada penurunan ketimpangan distribusi pendapatan. Ketika upah meningkat, daya beli masyarakat juga meningkat yang pada gilirannya dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka (Anshari et al., 2018).

Penetapan besaran upah minimum merupakan keputusan yang rumit dan membutuhkan pertimbangan yang sangat hati-hati karena pada satu sisi, jika upah minimum ditetapkan pada level yang terlalu rendah, hal ini dapat mengakibatkan pekerja tidak mampu mencapai standar kehidupan yang layak dan memadai. Kondisi ini berpotensi memperburuk kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Di sisi lain, ketika upah minimum ditetapkan pada tingkat yang terlalu tinggi,

konsekuensinya dapat menimbulkan *trade-off* dalam hal penyerapan tenaga kerja (Rohmah & Sastiono, 2021).



Gambar 1.2. Upah Minimum Provinsi Bali Menurut Kabupaten dan Kota (Rupiah)

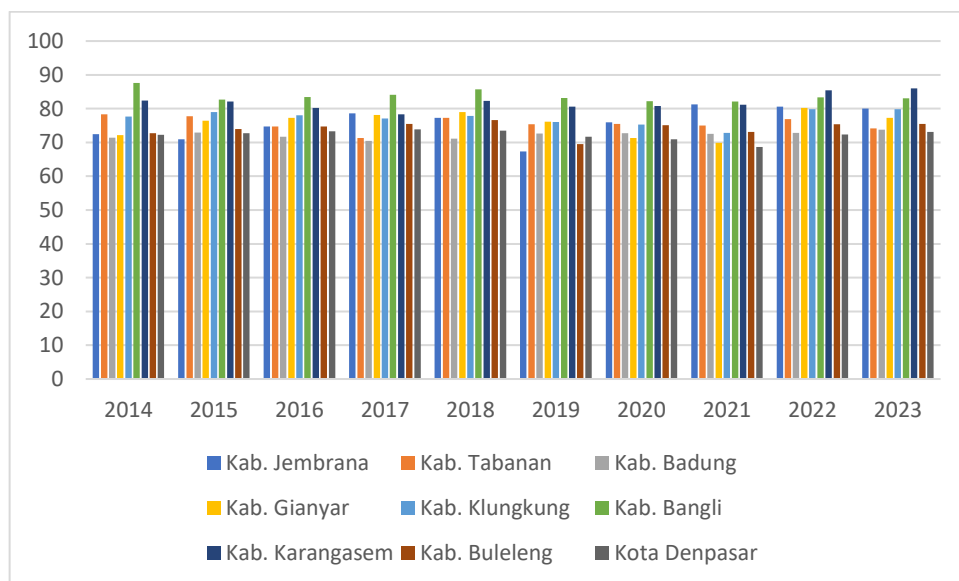
(Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah))

Berdasarkan data upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2014-2023, terlihat adanya perbedaan tingkat upah yang memperlihatkan adanya ketimpangan antar wilayah. Kabupaten Badung konsisten memimpin dengan upah minimum tertinggi, mencapai Rp 3.163.837 pada tahun 2023, diikuti oleh Kota Denpasar sebesar Rp 2.994.646. Sementara itu, Kabupaten Bangli memiliki upah minimum yang relatif rendah sebesar Rp 2.713.672 di tahun yang sama.

Dapat dilihat dengan bertambahnya tahun, pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum sebagai langkah untuk memenuhi kebutuhan hidup layak masyarakat di berbagai daerah (Triarsa & Purbadharmaja, 2021). Kebijakan ini dirancang agar standar penghidupan masyarakat dapat terus meningkat seiring dengan perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan sehari-hari. Adanya perbedaan

upah minimum diakibatkan oleh perbedaan potensi yang dimiliki masing-masing daerah tersebut.

Tingkat partisipasi angkatan kerja juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan karena semakin tinggi tingkat partisipasi tenaga kerja, semakin banyak individu yang terlibat dalam aktivitas ekonomi dan berpotensi memperoleh pendapatan. Di sisi lain, angkatan kerja yang rendah dapat memperburuk ketimpangan pendapatan. Ketika individu tidak dapat berpartisipasi dalam angkatan kerja, mereka tidak dapat memperoleh pendapatan dan berkontribusi terhadap pendapatan nasional (Pradnyaswari et al., 2020). Hal ini dapat memperburuk ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi dan yang berpenghasilan rendah.



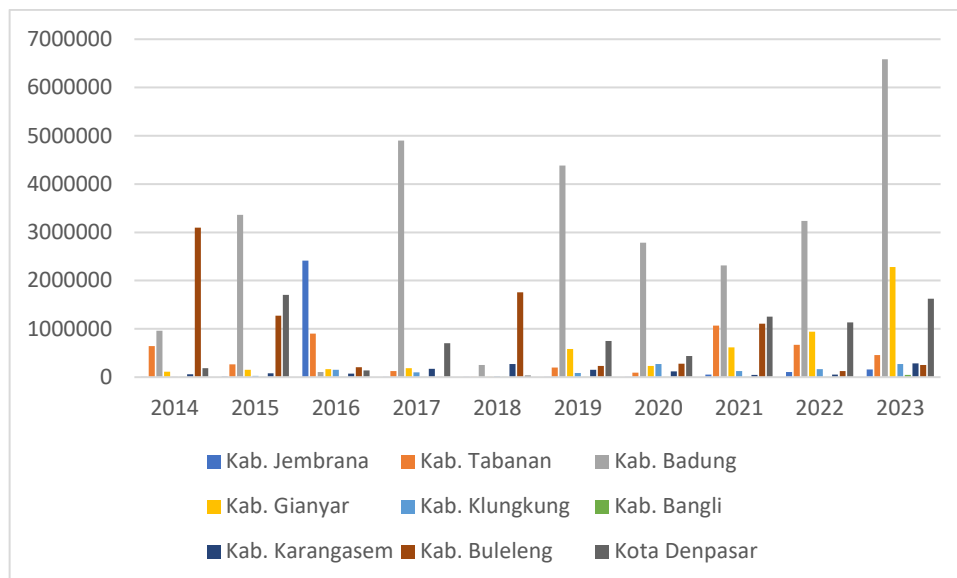
Gambar 1.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Bali Menurut Kabupaten dan Kota (Persen)
(Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah))

Berdasarkan data tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2014-2023 terdapat beberapa kabupaten yang menunjukkan peningkatan. Kabupaten Karangasem konsisten memiliki tingkat partisipasi

angkatan kerja tertinggi mencapai puncak tertinggi di tahun 2023 sebesar 86,01%.. Ibukota provinsi yakni Kota Denpasar justru memiliki TPAK terendah dibandingkan wilayah lain sebesar 73,13% pada tahun 2023. Perbedaan ini menggambarkan karakteristik di setiap daerah dengan wilayah pedesaan, seperti Bangli dan Karangasem, menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah perkotaan seperti Denpasar.

Faktor lain yang dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun sektor swasta, termasuk investasi dari penanaman modal asing (PMA) (E. S. Wijayanti & Aisyah, 2022). Menurut Hirschman ketimpangan investasi dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik alam, sosial, dan ekonomi yang ada di setiap wilayah. Kondisi ini sering menjadi kendala bagi para investor dalam memilih lokasi yang dianggap potensial untuk dikembangkan (Yanthi & Sutrisna, 2021).

Provinsi Bali termasuk memiliki daya tarik yang tinggi bagi investor asing untuk menanamkan modalnya, terutama disektor pariwisata. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif, seperti peningkatan penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi akan berkontribusi pada terciptanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Danawati et al., 2016). Namun, di sisi lain jika manfaat dari PMA ini tidak didistribusikan dengan merata akan memperburuk ketimpangan pendapatan, terutama jika investasi tersebut terfokus pada sektor tertentu yang tidak menyerap tenaga kerja lokal menurut Sayekti dalam (Sebo & Sukadana, 2022).



Gambar 1.4. Penanaman Modal Asing Provinsi Bali Menurut Kabupaten dan Kota (Juta Rupiah)
(Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah))

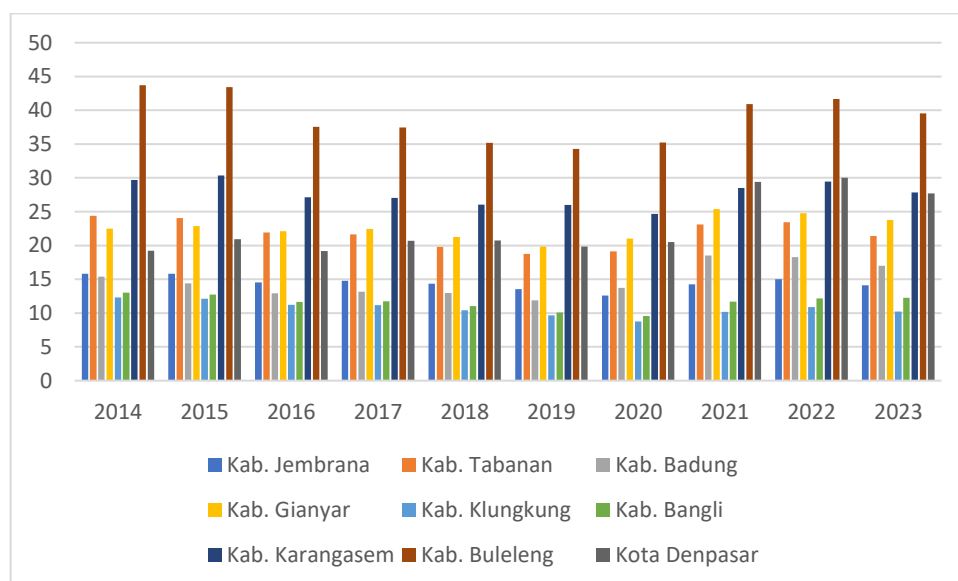
Berdasarkan data penanaman modal asing (PMA) kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2014-2023 menunjukkan adanya ketimpangan. Di tahun 2023 Kabupaten Badung mencatat realisasi tertinggi dengan nilai mencapai 6.587.903 juta rupiah, jauh melampaui kabupaten lainnya. Kabupaten Gianyar mengikuti dengan nilai investasi sebesar 2.283.607 juta rupiah. Di sisi lain, Kabupaten dengan realisasi investasi terendah adalah Bangli dengan nilai 45.809 juta rupiah.

Kondisi ini terjadi karena sebagian besar modal asing terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu yang dianggap memiliki potensi besar untuk menghasilkan keuntungan (E. S. Wijayanti & Aisyah, 2022). Sementara itu, banyak daerah lain dengan tingkat investasi cenderung rendah, bahkan sangat minim. Hal ini menunjukkan bahwa para investor lebih memilih daerah yang dianggap menguntungkan, sehingga memperlebar kesenjangan ekonomi antar wilayah.

Faktor lainnya yang dapat memengaruhi ketimpangan pendapatan yakni kemiskinan yang ditandai dengan banyaknya orang yang hidup dibawah garis

kemiskinan (Kurnianingsih et al., 2019). Garis kemiskinan merujuk pada batas minimum pengeluaran dalam bentuk rupiah yang diperlukan oleh seseorang untuk mencukupi kebutuhan dasar hidupnya, baik kebutuhan pangan maupun non-pangan, dalam kurun waktu satu bulan (BPS, 2022).

Ketimpangan tidak hanya terjadi di daerah pedesaan, tetapi juga meluas hingga ke wilayah perkotaan. Menurut World Bank dalam (Wahed & Sishadiyati, 2020), kemiskinan disebabkan oleh rendahnya pendapatan dan keterbatasan aset, sehingga individu kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, serta akses yang layak terhadap layanan kesehatan dan pendidikan sehingga menyulitkan mereka untuk meningkatkan taraf hidup. Kondisi tersebut mengakibatkan pendapatan kelompok masyarakat miskin tertinggal jauh dibandingkan dengan kelompok lain yang lebih sejahtera.



Gambar 1.5. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten dan Kota (Ribuan Jiwa)

(Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah))

Berdasarkan data jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2014-2023 menunjukkan adanya fluktuasi jumlah penduduk miskin di setiap

wilayah. Dapat dilihat Kabupaten Buleleng memiliki angka kemiskinan tertinggi selama 10 tahun berturut-turut. Akan tetapi, di tahun 2023 sedikit menurun menjadi 39,52 ribu jiwa. Sebaliknya, Kabupaten Klungkung mencatat angka kemiskinan terendah di tahun 2023 menjadi 10,22 ribu jiwa.

Dengan demikian, meskipun Provinsi Bali didukung oleh pendapatan dari beberapa kabupaten yang memiliki beragam potensi, masalah kemiskinan tetap menjadi isu yang klasik dan belum sepenuhnya terselesaikan. Di balik semua keunggulannya, kabupaten dan kota di Provinsi Bali masih menghadapi keberadaan rumah tangga miskin di wilayahnya.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terkait upah minimum yang diteliti oleh Pasoman dan Nugroho Sumarjiyanto Benedictus Maria (2023) menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. Namun, hasil penelitian tersebut tidak sependapat dengan penelitian yang diteliti oleh Ika Fitriyani, Syafruddin, Asmini, dan Novi Kadewi Sumbawati (2024) menyebutkan bahwa upah minimum tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Sumbawa.

Kemudian penelitian sebelumnya tentang tingkat partisipasi angkatan kerja yang dilakukan oleh Rara Min Arsyillah (2019) menyatakan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di seluruh provinsi di Indonesia. Namun, hasil penelitian tersebut tidak sependapat dengan penelitian yang diteliti oleh Emi Haryaty Nengsih, Syamsurijal Tan, dan Erni Achmad (2023) menyatakan bahwa

tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif, namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi.

Penelitian sebelumnya tentang penanaman modal asing yang diteliti oleh Queentha Kasman Karimi, Pertiwi Mulyani, Neng Murialti, dan Tibrani (2023) menyebutkan bahwa penanaman modal asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Namun, hasil penelitian tersebut tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Monica Maorencia & Marwan (2023) menyatakan bahwa penanaman modal asing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.

Penelitian sebelumnya tentang jumlah penduduk miskin yang diteliti oleh Muhammad Fachruurrozi dan Maulidiah Indira Hasmarini (2023) menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Akan tetapi, hasil dari penelitian tersebut tidak sependapat dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Anis Kurnianingsih, Sudati Nur Sarfiah, dan Gentur Jalunggono (2021) menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta.

Dengan adanya perbedaan dari beberapa hasil penelitian sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisa determinan ketimpangan distribusi pendapatan dengan mempertimbangkan ke khas an dan karakteristik serta struktur ekonomi masing-masing wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Bali. Hasil temuan penelitian ini diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah guna merancang langkah-langkah yang lebih efektif untuk meratakan pembangunan ekonomi di Provinsi Bali.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang, adapun beberapa permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah upah minimum memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten dan kota di Provinsi Bali?
2. Apakah tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten dan kota di Provinsi Bali?
3. Apakah penanaman modal asing memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten dan kota di Provinsi Bali?
4. Apakah jumlah penduduk miskin memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten dan kota di Provinsi Bali?

1.3 Tujuan

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dipaparkan, penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk mencapai beberapa tujuan berikut ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten dan kota di Provinsi Bali.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten dan kota di Provinsi Bali.
3. Untuk mengetahui pengaruh penanaman modal asing terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten dan kota di Provinsi Bali.
4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi analisis faktor-faktor penyebab ketimpangan pendapatan di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Bali yaitu upah minimum, tingkat partisipasi angkatan kerja, penanaman modal asing, dan jumlah penduduk miskin dalam jangka waktu 2014-2023. Adanya pembatasan ruang lingkup ini agar penelitian lebih terfokus pada faktor penyebab ketimpangan pendapatan di Provinsi Bali serta dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang sesuai.

1.5 Manfaat

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap guna menyajikan seputar manfaat yakni:

1. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat menyajikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dan pembuat kebijakan di Provinsi Bali dalam merumuskan kebijakan yang tepat terkait faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dengan tujuan untuk meratakan pembangunan.

2. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang bagaimana faktor tersebut dapat berpengaruh dalam konteks daerah wisata yang memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda terhadap ketimpangan pendapatan.
- b. Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi studi-studi lanjutan, baik dalam lingkup regional maupun nasional, untuk menggali lebih dalam faktor-faktor penyebab ketimpangan pendapatan serta mencari solusi yang lebih efektif dan efisien dalam meratakan pembangunan.